

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan Negara Indonesia yang menyeluruh dan merata berpedoman pada kitab undang-undang 1945 Pasal 33 dimaksudkan sebagai landasan pembangunan yuridis sistem ekonomi indonesia melainkan sebagai landasan konsepsional tempat dasar- dasar sistem ekonomi ditegakkan. pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan.¹

Setelah bergulir selama hampir dua dekade, Pelaksanaan

¹Windu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018),162.

desentralisasi daerah dalam anggaran melalui otonomi daerah senantiasa mengalami perkembangan. pusat telah menunjukkan komitmennya dalam rangka memperkuat desentralisasi, salah satunya melalui desentralisasi fiskal yang ditandai dengan terus meningkatnya besarnya alokasi dana transfer kedaerah dalam anggaran pendapatan belanja negara dari tahun ke tahun. bahkan sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan kepada desa melalui skema dana desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.² dengan demikian, desentralisasi fiskal telah menjangkau level pemerintahan terendah di Indonesia. berbagai dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut mampu dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan daerah sebagai penopang pembangunan nasional. namun demikian, sampai dengan saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masih relatif tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan

² Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

belum optimal.³ Prioritas ketuhanan dalam berekonomi sangat diutamakan dalam praktik kehidupan. menurut Adurrahman Al-Maliki, Negeri Negeri Islam harus merancang politik ekonominya secara mandiri berdasarkan pemikiran komprehensif yang dianutnya, yaitu aqidah islam. artinya kebijakan ekonomi negeri –negeri Islam harus berupa hukum hukum syariah yang digali dari Al-Quran dan As-sunah atau dalil dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-sunah. Kebijakan selain dari itu adalah kebijakan ekonomi rusak. rancangan dan usaha penerapannya hanya akan menghantarkan pada akumulasi masalah-masalah ekonomi, proses pemiskinan manusia serta pengabdian keterbelakangan dan kekacuan.⁴ Salah satu penggerak desa adalah perangkat desa. Perangkat desa sendiri merupakan salah satu struktur sebagai pelaku desa yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa sebagaimana diungkapkan abiding(2015) yang menemukan bahwa otonomi desa akan ada pengelolaan

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*, (Jogjakarta: Andi, 2018), 9.

⁴ Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*, (Serang: Dindik Banten, 2012), 7.

keuangan desa. pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa adalah unsur organ pemerintah desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan berkedudukan dibawah kepala desa. Desa sendiri memiliki sumber daya yang tak terkira terutama sumberdaya alam.sebagai unsur desa, perangkat desa dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat serta segala sumber daya yang desa itu miliki secara baik (*Good Governance*) dengan demokratis dan juga juga desentralis.Keuangan merupakan alat vital bagi organisasi desa. perangkat desa merupakan salah satu alat untuk kemajuan desa,pengelolaan penggunaan keuangan desa yang tranparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses penerimaan dan pencatatan pendapatan desa,baik pendapatn Asli Desa (PAD) yang berasal dari masyarakat desa dan lingkungan desa maupun tranfer yang berasal dari pemerintah pusat.Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (pemerintah pusat/Propinsi/Kab.Kota, masyarakat, pihak Ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan. kepala dusun) dan bank. Pengeluaran

belanja desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik desa seperti pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Kab/Kota.⁵

Pertumbuhan ekonomi suatu Bangsa atau Negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. secara umum, pertumbuhan pertumbuhan tersebut dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun bukan merupakan satu satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi output suatu bangsa. ini representative dan sangat lazim digunakan. pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu Negara dari waktu ke waktu. tetapi membandingkan dengan Negara lain. disamping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunannya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.⁶ Fredrik list, adalah penganut paham laissez faire dan berpendapat bahwa system ini dapat menjamin alokasi sumber-

⁵Jumaiyah dan Wahidullah, *Jurnal Riset Akuntansi, Auditing&informasi* Vol.19 No.1 April 2019.

⁶Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2012),29.

sumber, tetapi proteksi terhadap industri industri tetap diperluan. pemerintah, organisasi-organisaswasta, entrepreneur dan kebudayaan masyarakat.⁷

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil danmemberdayakan kelompok- kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat⁸. Islam memiliki ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan⁹. Ia memiliki dasar akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqashid syariah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini.sasaran-sasaran yang (dikehendaki) islam secara mendasar bukan materiil.

⁷Subandi,*SistemEkonomi Indonesia*.....,30

⁸Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014),2.

⁹Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta:Gema Insani,2000),7.

Peraturan pemerintah tidak dapat mengganti kedudukan kewajiban moral, tetapi juga ditetapkan untuk memberikan ekspresi bagi standar kualitas dan perilaku yang secara sosial diterima dengan tujuan melindungi kepentingan umum. akan tetapi, jika supremasi nilai-nilai moral secara kolektif tidak diakui, makin banyak regulasi yang harus ditegakkan dan diberlakukan.¹⁰

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa jangan terpusatkan pada pembangunan fisik saja dan pemerataan dalam pemberdayaan kepada masyarakat Desa Pegadingan, Tonjong, Kramatwatu
2. Pengetahuan terhadap pengelolaan Penggunaan dana yang bersumber Dari APBN dan pendapatan asli desa itu sendiri Masih mengambil contoh Pada Juknis Tahun sebelumnya
3. Masih Tingginya penyalagunaan anggaran desa sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

¹⁰Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,.....25.

4. Masih kurangnya pengetahuan tentang sektor perkonomian syariah sebagai arah baru alternatif ekonomi berkeadilan

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang menjadi objek penelitian tidak meluas dan menyimpang, Ole karena itu, penulis membatasi masalah dalam penelitian, Penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut; Manajemen penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam Perspektif Ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan,identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Pegadingan, Tonjong dan Kramatwatu Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Pemerintah Desa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Pegadingan, Tonjong dan Kramatwatu Kabupaten Serang?
3. Bagaimana Pengelolaan Penggunaan Dana Desa dalam

perspektif Ekonomi Syariah di Desa Pegadingn desa, desa Kramatwatu Kabupaten Serang ?

4. Apa faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Dana Desa di Desa Pegadingn Desa, Tonjong Desa Kramatwatu Kabupaten Serang ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Manajemen Penggunaan Dana Desa dalam perpektif ekonomi syariah didesa Pegadingan, Tonong dan Kramatwatu Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui Pemerinah desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa Pegadingan, Tonjong dan Kramatwatu Kabupaten Serang
3. Untuk mengetahui pengelolaan Penggunaan Dana Desa dalam perspektif ekonomi syari'ah di Desa Pegadingan, Desa Tonjong, Desa Kramatwatu Kabupaten Serang
4. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana desa

Beberapa manfaat dari penelitian ini mempunyai dua

Manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan Manfaat secara praktis.

1. Bagi peneliti, Penelitian ini sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar magister ekonomi serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan pengelolaan penggunaan dana desa di didesa Pegadingan, Tonjong dan desa Kramatwatu Kabupaten serang
2. Bagi Pembaca, Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun referensi mengenai pengelolaan penggunaan dana desa di desa pegadingan, Tonjong dan Kramatwatu Kabupaten Serang
3. Bagi program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi studi Ekonomi Islam
4. Bagi Kajian Pemngembangan Ekonomi Syariah di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan penerapan pengelolaan penggunaan dana desa dalam meningkatkat taraf kesejahteraan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah memperhatikan,menimbang,dan menganalisis dari berbagai karya ilmiah atau penelitian sebelumnya yang secara umum sudah banyak yang membahas tentang Manajemen penggunaan Dana desa namun peneliti mencoba ingin sedikit menegaskan dari sisi perpektif ekonomi syariah diantaranya:

1. Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Ekonomi mayarakat dikecamatan langsa kota oleh:Fahrul Ridha
2. Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat perpektif PP.No.6 Tahun 2014 dan kompilasi Hukum Ekonomi syariah (didesa Kamasan dan kamulan Kab,Trenggalek) oleh:Danang Permadi.
3. Analisis pengelolaan Alokasi dana desa terhadap kesejahteraan Masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di desa rejosari mataram lampung Tengah oleh: suci wulandari.

Adapun Tinjauan dalam penelitian ini adalah ; agar peneliti dimudahkan dan memahami agar tidakmemilikidan persamaan persepsi dalam penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “Alat dan wadah” saja. tetapi harus diatur dengan sebaik baiknya. karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Menurut Hasibuan “Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.¹¹ Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas baik fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya tidak terbatas maka sangat diperlukan ilmu manajemen untuk mengatur keterbatasan sumberdaya itu Tujuan yang ditetapkan dalam suatu rencana, karena itu hendaknya tujuan ditetapkan dengan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.¹²

Seiring dengan pemikiran manusia, para tokoh manajemen melahirkan pemikiran tentang ilmu-ilmu manajemen yang baru yang terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan ilmu-ilmu manajemen terus berkembang seiring perubahan waktu dan konteks, sehingga banyak konsep dan Ilmu manajemen itu sendiri. Ilmu manajemen merupakan salah satu bagian ilmu

¹¹Malayu.S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar Dan Pengertian Masalah*, (PT.Bumi Aksara:2011),p.2

¹²Malayu.S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar Dan Pengertian Masalah*,.....3.

pengetahuan yang ada di muka bumi ini yang diciptakan dan dikembangkan serta digunakan oleh manusia. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan pemikiran dan peradaban manusia khususnya dalam mengelola (manajemen). Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam. QS.Al-An-Kabutayat43.¹³

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ٤٣

Artinya : “ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Qs.Al-An-kabut; ayat (43)

Dan Allah SWT Berfirman Qs.Al-Mujadilah Ayat(11)¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan

¹³ Al-Quran Dan Terjemahan, Cipta Bagus Segara, Bekasi :2014.

¹⁴ Al-Quran Dan Terjemahan, Cipta Bagus Segara, Bekasi :2014.

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Pada dasarnya Manajemen merupakan istilah lain pengelolaan dari akar katanya adalah “kelola” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” selain itu, makna Manajemen yaitu proses agar tercapainya tujuan suatu organisasi. Definisi Manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan”.¹⁵

Pendapat tersebut mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manager yang secara individu maupun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi. bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan

¹⁵Awaluddin, Jurnal Fungsi manajemen dalam pengadaan infrastruktur Desa Volume 2 No. 1 April 2018, 1-12.

pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumberdaya informasi material uang dan orang. Manager sendiri menurut Plunket merupakan *People who are allocate and oversee the use of resources* artinya orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumberdaya.

Kiranya sudah diakui secara universal bahwa salah satu aspek kehidupan yang didambakan oleh umat manusia ialah terwujudnya peningkatan mutu hidup dan tidak sebatas peningkatan taraf hidup. karena pengakuan itulah, semua Negara berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. tidak akan meleset apabila dikatakan bahwa Terdapat paling sedikit lima sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan ekonomi. diantaranya; tersedianya wahana sehingga memuaskan berbagai kebutuhan khususnya Kebutuhan bersifat primer, mengatasi kesenjangan ekonomi, pertumbuhan di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁶

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses,

¹⁶SondangP, *Manajemen abad 21*,(Jakarta: Bumi Aksara,2004),17

cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama¹⁷. Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya¹⁸.

Tidak berbeda dengan lingkungan sosial, lingkungan ekonomi juga meliputi aspek yang sangat luas. dihubungkan dengan pengelolaan usaha, maka aspek yang paling dekat dengan lingkungan ekonomi adalah lembaga pembiayaan. bila lembaga perbankan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam

¹⁷<https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat>

¹⁸ Ulum dkk, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta: PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007), 120.

permodalan dengan tingkat suku bunga yang murah, maka ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha. Namun sebaliknya, apabila pemerintah membuat aturan bea masuk import untuk sayuran dan komoditi lainnya sangat rendah, maka keadaan inilah akan mematikan para pelaku usaha tradisional di bidang sayuran. Keputusan pemerintah untuk menganjurkan kepada masyarakat sebanyak banyak membeli produk-produk buatan dalam negeri akan memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan usaha kecil menengah.¹⁹ Kekuatan dan vitalitas suatu kelompok masyarakat bergantung kepada kemampuannya memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa bagi para anggotanya dan masyarakat-masyarakat lain. Produksi dan distribusi barang dan jasa menurut sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian manajemen. Tidak semua orang dibekali sumber daya yang optimal. Penghimpunan sumber-sumber daya ini harus diorganisasikan dengan suatu cara yang saling menguntungkan dengan konsep kemitraan usaha.²⁰

¹⁹Mulyadi N, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Cv. Alfabeta: Bandung, 2012), 161.

²⁰ Veithzai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 176.

Akses satu pintu untuk memasuki sektor informal dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah relatif sangat terbuka, terutama bagi mereka yang mampu melihat peluang usaha. Peluang usaha seyogyanya dilihat dari kebutuhan dan keinginan sekelompok pembeli yang kita sebut dengan segmentasi pasar. Dewasa ini kemajuan teknologi yang demikian pesat, khususnya dalam dunia komunikasi antar manusia, membuka peluang yang demikian besar bagi seseorang untuk membuka usaha dalam bentuk kios Telepon Genggam. Sekalipun kecanggihan telepon genggam mengalami peningkatan terus menerus, tidak seluruh masyarakat konsumen mampu membeli model tercanggih. Oleh karena itu Pelaku usaha kecil menengah harus mendapatkan perhatian khusus dan proses pendampingan agar bisa berkembang dan besar dan berkontribusi buat Pembangunan nasional.²¹

Perkataan Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (Greek) yaitu “oikos” yang berarti “rumah” dan “Nomos” yang

²¹Mulyadi Nitisusastri, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Cv Alfabeta. 2012), 17.

berarti “aturan”Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggaraan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga,baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga Negara.dalam bahasa arab, ia dinamakan (al – muamalah al madiyah), yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya.Lebih tepat lagi dinamakan al-iqtisadiyah, yang artinnnya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal pengidupan manusia dengan sehemat–hematnya atau secermat cermatnya. persoalan ekonomi itu sudah dimulai sejak manusia dihadirkan ke permkuaan bumi. pada saat mereka masih diSurga,Allah SWT. menjamin bahwa nabi Adam as tidak akan kelaparan dan kehausan dan tidak akan ditimpa panas terik matahari.Meski muncul persoalan ekonomi, namun Allah SWT telah memberikan jaminan dalam Al-Quran yang artinya:

“Dan tida ada suatu binatang melatapun dibumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya,dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya,semuanya

tertulis dalam kitab yang nyata(lauhil mahfud)” QS.Hud:6²²

Munculnya teori ekonomi adalah sebagai respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi yang terjadi pada waktu waktu tertentu.padahal selama lebih dari 500 tahun tersebut, system ekonomi islamlah yang telah berperan dan memberikan kontribusinya kepada dunia, yang dimulai sejak jaman pemerintahan Rosulullah SAW. Dasar pemikiran adanya konsep ekonomi islam adalah berangkat dari sebuah asumsi adanya pelarangan riba dalam kegiatan ekonomi yang dibangun bukan berlandaskan kepada keadilan dan lebih mementingkan kepada segelintir orang dan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah tanpa bolehnya masyarakat ikut campur dalam menggunakan pendapatan mereka maka bentuk kedoliman dan eksploitasi akan mudah dirasakan oleh masyarakat. Riba dengan segala bentuknya termasuk kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah islam (haram) lahirnya pemikiran ekonomi islam atau istilah lain disebut ekonomi syariah adalah sebagai langkah brilian dan upaya terpuji

²²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2017),37.

yang diwakili oleh unsur ulama dan para pakar ekonomi.²³

Riba merupakan sub system ekonomi yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu tetapi mengabaikan kepemimpinan masyarakat luas. Al-Quran hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat. Dalam aspek ekonomi dan bisnis, Al-Quran menawarkan prinsip keadilan dan kesucian yang melarang pemilikan harta yang terlarang (haram) terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolaannya dan merugikan pihak lain.²⁴. Bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni; Tauhid (Keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan) dan Ma'ad (Hasil). Kelima nilai ini menjadi menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan

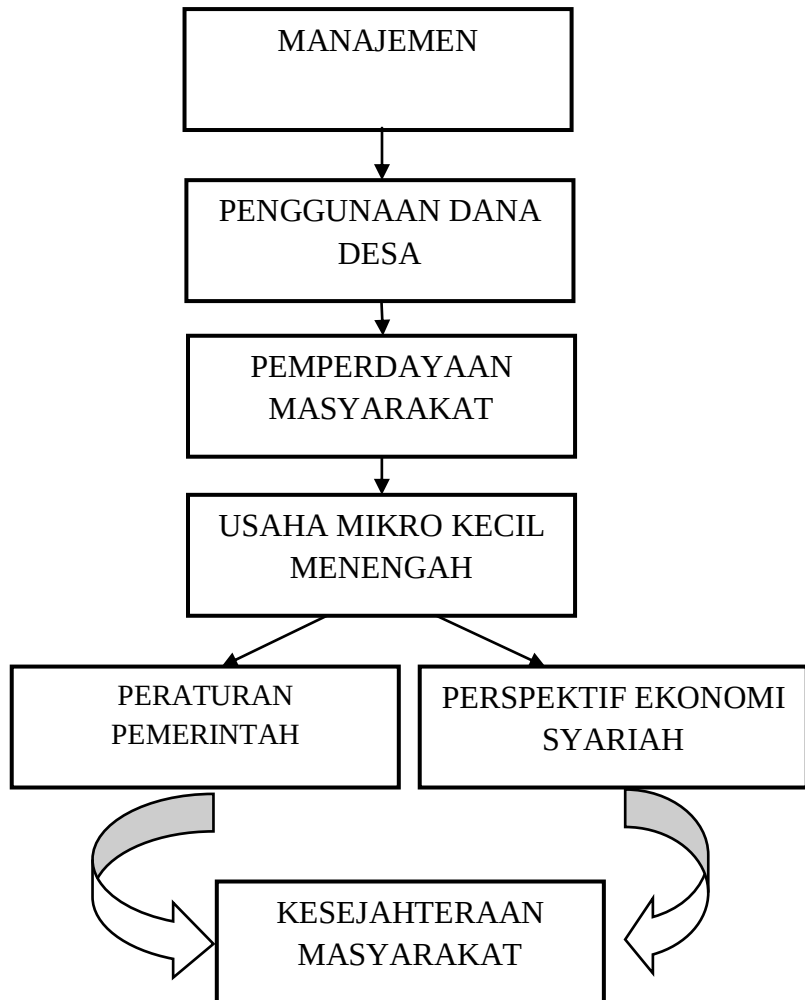
²³Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*, (Jogjakarta: deepublish, 2016), 59.

²⁴Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba diniyah, 2002), 68.

menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. selain nilai-nilai yang dibangun diatas akhlak juga menjadi menjadi nilai penting karena nilai ini menjadi tujuan islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia.²⁵ Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut, dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional (ihsan itqan) dalam bidang ekonomi, baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah.

²⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

Tabel 1.1
Konsep Kerangka Pemikiran



Gambaran konsep diatas peneliti ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan dana desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam tinjauan

ekonomi syariah guna kemaslahatan umat dan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dinikmati bersama guna pembagunan percepatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini terbagi atas lima Bab terdiri tersusun sebagai mana berikut:

Bab Ke Satu Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Sistematika pembahasan

Bab Ke Dua, Kajian Teoritik, terdiri, Manajemen, Pengertian Manajemen, prinsip dan tujuan Manajemen, Manajemen Penggunaan Dana Desa, Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Dana, Ekonomi Syariah, Peraturan dan Mekanisme Penggunaa Dana Desa

Bab Ke Tiga, Metode Penelitian, terdiri Pendekatan Penelitian, Tempat dan waktu Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data, Instrumen penelitian, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Keabsahan Data.

Bab ke Empat Meliputi, Hasil Penelitian dan Pembahasan Upaya Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tinjauan Ekonomi syariah dalam Penggunaan Dana Desa dalam Kesejahteraan dan, Pemberdayaan masyarakat, Manajemen Pengelolaan Dana di Desa Tonjong, Pegadingan dan Desa Kramatwatu.

Bab KeLima, Penutup, Terdiri dari Simpulan, Implikasi dan Saran-Saran.